

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BONE
TAHUN 2018**



**DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BONE**

Jln. Laks. Yos. Sudarso No. 29
Tlp/Fax. (0481)21028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perdagangan Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).


LKj Dinas Perdagangan disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Perdagangan Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan . Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Perdagangan ,bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Perdagangan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Perdagangan Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Perdagangan. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Perdagangan pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Perdagangan Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 6 (Enam) indikator kinerja utama, terdapat 2 (dua) indikator yang telah melebihi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Perdagangan Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Watampone, 04 Februari 2019

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BONE,

H. SUMARDI, S.Sos. M.Si
NIP. 19680821 199103 1 010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Perdagangan Kabupate Bone untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Dinas Perdagangan Kabupaten Bone tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2018 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupate Bone

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih besar dari target yang ditetapkan untuk tahun 2018 yaitu : Kontribusi sector Perdagangan terhadap PDRB, Persentase Pasar dalam Kondisi Baik, Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang, dan Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti. Sedangkan ada 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang lainnya realisasinya dibawah 100% yaitu : Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi dan Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %).

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perdagangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bone dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	7
Latar Belakang	7
Maksud dan Tujuan	8
Gambaran Umum Organisasi	8
Isu Strategis	13
Inovasi Pelayanan Publik	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
Rencana Strategis	16
Visi dan Misi BUPATI DAN WAKIL BUPATI	16
Visi dan Misi Dinas Perdagangan	17
Tujuan dan Indikator Kinerja	18
Sasaran dan Indikator Kinerja	19
Program untuk Pencapaian Sasaran	19
Perjanjian Kinerja Tahun 201...	20
Indikator Kinerja Utama (IKU)	21
Rencana Anggaran Tahun 201...	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
Capaian Kinerja Organisasi	26
Capaian Indikator Kinerja Utama 201...	26
Perbandingan Capaian Kinerja	27
Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	46
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin	10
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Pangakt/Golongan	11
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabuoaten Bone Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 2.1	Tujuan dan Indikator Kinerja DInas Perdagangan	18
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan	19
Tabel 2.3	Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2018	20
Tabel 2.5	IKU Dinas Perdagangan	21
Tabel 2.6	Rencana Belanja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018	22
Tabel 2.7	Alokasi Per Sasaran Tahun ANggaran 2018	23
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Ordinal	26
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Sasaran	27
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2018	27
Tabel 3.4	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	28
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	28
Tabel 3.6	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.	30
Tabel 3.6	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.	29

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone	9
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin	11
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Pangkat/Golongan	11
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 1.4	Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan UKM	12
Gambar 2.1	Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	15
Gambar 3.1
Gambar 3.2
Gambar 3.3
Gambar 3.4



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Perdagangan Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

Pembentukan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Dinas Perdagangan

Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

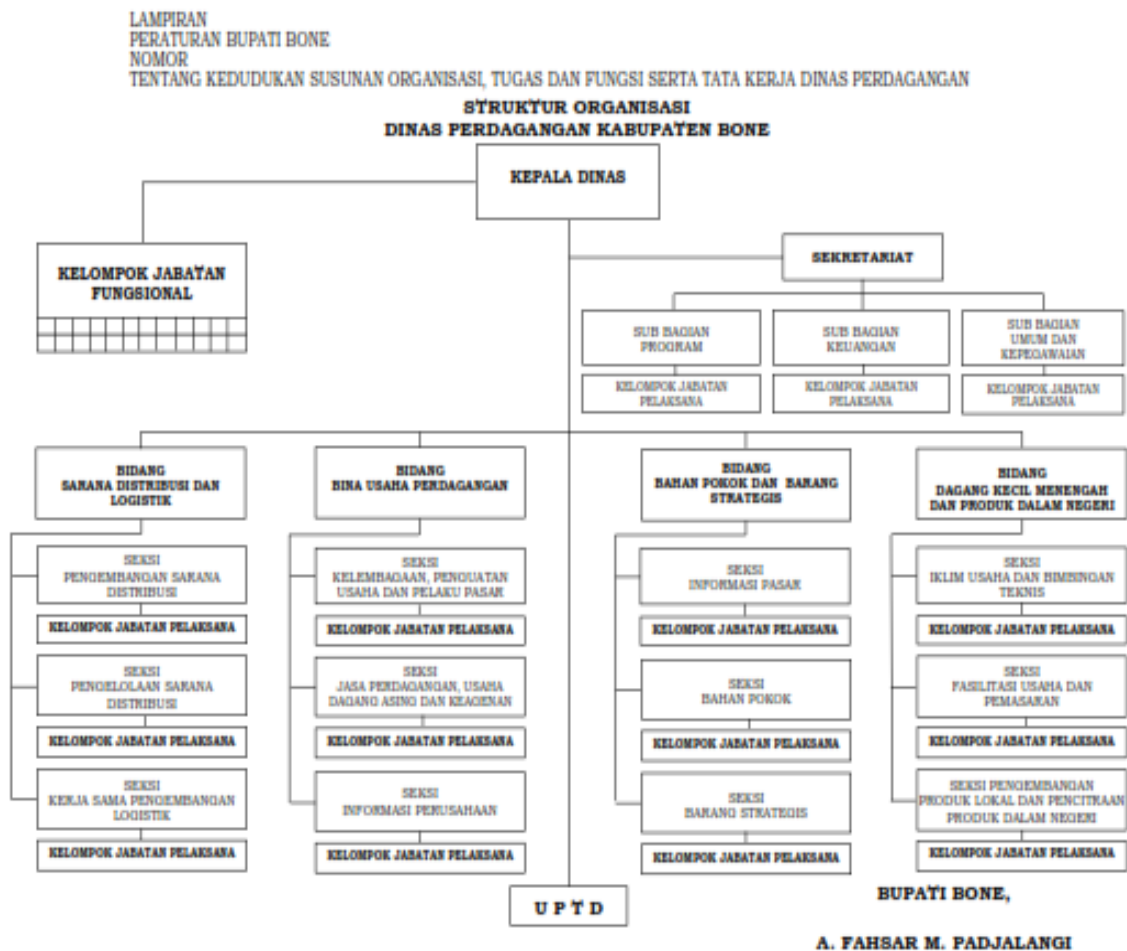
b. Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
4. pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Perdagangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi

Dinas Perdagangan Kabupaten Bone memiliki susunan organisasi sebagai berikut

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program;
 - 3. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
- c. bidang pengembangan sarana distribusi dan logistik terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Sarana Distribusi;
 - 2. Seksi Pengelolaan Sarana Distribusi; dan
 - 3. Seksi Kerja Sama Pengembangan Logistik .
- d. bidang bina usaha perdagangan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan. Penguatan Usaha dan Pelaku Pasar;
 - 2. Seksi Jasa Perdagangan, Usaha Dagang Asing dan Keagenan; dan
 - 3. Seksi Informasi Perusahaan.
- e. bidang bahan pokok dan strategis terdiri dari :
 - 1. Seksi Informasi Pasar;
 - 2. Seksi Bahan Pokok; dan
 - 3. Seksi Barang Strategis.
- f. bidang dagang kecil, menengah dan produk dalam negeri terdiri dari :
 - 1. Seksi Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis;
 - 2. Seksi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Produk Lokal dan Penciptaan Produk dalam Negeri.
- g. UPTD
- h. kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.



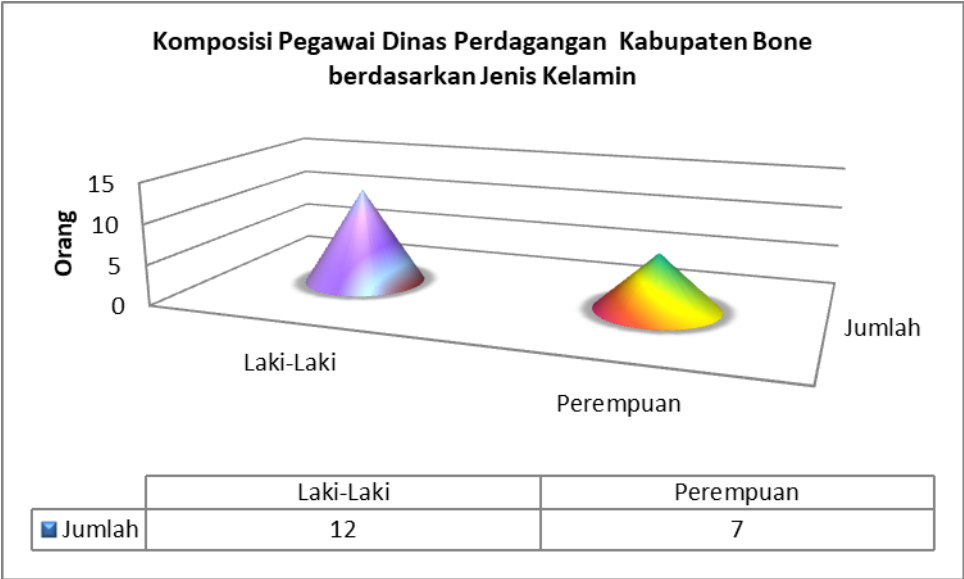
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

Jumlah pegawai yang berstatus PNS Dinas Perdagangan Kabupaten Bone sampai dengan bulan Oktober 2018 adalah sebanyak 19 orang dan 24 Orang Staf Tenaga Kontrak/Honorar, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1:
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-Laki	12	
2	Perempuan	7	
Jumlah		19	

Sumber : Disdag tahun 2018



Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2

Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan IV	7 orang	
2	Golongan III	11 orang	
3	Golongan II	1 orang	
4	Golongan I	0 orang	
5	Staf/Honorer	24 Orang	
Jumlah		43 orang	

Sumber :Daftar Hadir Dinas Perdagangan 2018



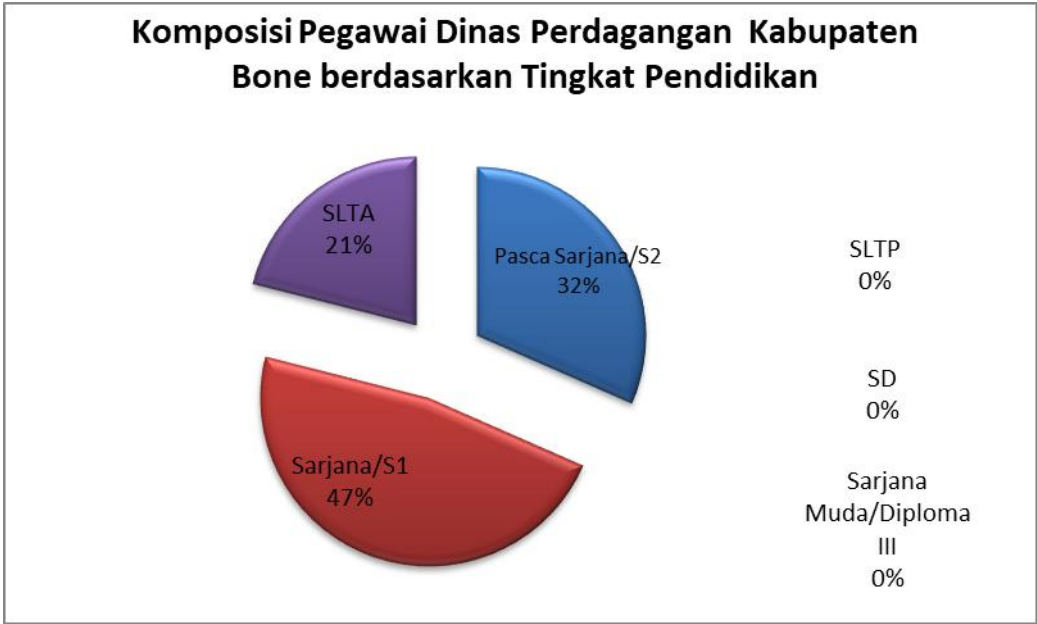
Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan pangkat/Golongan

Komposisi tingkat pendidikan pegawai Dinas Perdagangan dapat di lihat pada table 1.3 .

Tabel 1.3:
Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana/S2	6 orang	
2	Sarjana/S1	9 orang	
3	Sarjana Muda/Diploma III	0 orang	
4	SLTA	4 orang	
5	SLTP	0 orang	
6	SD	0 orang	
Jumlah		19 orang	

Sumber : Disdag Laporan tahun 2018



Gambar 1.4 Komposisi Pegawai Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan nukleus organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam membawa Dinas Perdagangan untuk mencapai tujuannya. Tujuan Dinas Perdagangan hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang andal dan professional .Demikian penting dan strategisnya peran pegawai/aparatur ini menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan danDinas Perdagangan.Tanpa itu semua pegawai justru dapat menjadi sumber penyebab terjadinya pemborosan dan inefisiensi, dan sangat sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 disusun berdasarkan isu strategis dari permasalahan - permasalahan program yang ditemukan dalam penyelenggaraan kegiatan – kegiatan pembangunan di lapangan. Untuk menentukan isu strategis secara benar dan akurat maka beberapa fakta - fakta kegiatan penting dalam pembangunan sekte Perdagangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Anggaran yang terbatas
- c. Kurangnya jumlah SDM dibandingkan dengan Perdagangan yang dibina
- d. Rendahnya kontribusi Perdagangan dalam PDRB
- e. Rendahnya akses dan jaringan pasar
- f. Masih kurang networkning dalam pembinaan
- g. Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha
- h. Masih kurangnya cakupan dan volume pembinaan pada UDKM
- i. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi wirasusahawan

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah Pusat Pelayanan dan Pengembangan UKM dengan Moto “UKM MAU MAJU AYO KE KLINIK UKM “. Pusat Pelayanan dan Pengembangan ini di buat dengan tujuan meningkatkan pengetahuan UKM dalam mengembangkan Usahanya.

Pusat Pelayanan dan Pengembangan UKM ini berkantor di Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Kegiatan yang dilakukan adalah :

1. Memfasilitasi UKM untuk mengusulkan bantuan Modal Usaha Kecil dan Menengah pada Bank atau Koperasi.
2. Memfasilitasi UKM dalam membuat administrasi usahanya
3. Memfasilitasi UKM yang ingin melakukan perbaikan Kemasan
4. Memfasilitasi UKM dalam mempromosikan Produk yang di Hasilkan
5. Membuka Konsultasi UKM terkait pengembangan Usahanya .



Gambar 1.5 Kegiatan Pelayanan dan Pengembangan UKM



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.



Gambar 2.1
Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 VISI dan MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone 2013-2018 adalah

Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Selanjutnya apabila dikaji visi tersebut, maka dapat diketahui ada 3 (tiga) frase, yaitu sehat, cerdas, dan sejahtera, dengan penjabaran masing-masing frase sebagai berikut :

1. Sehat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan memperluas aksesibilitas pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas.

2. Cerdas

Terciptanya pemerataan pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, berkebutuhan khusus, difable dan marginal yang berkualitas untuk mewujudkan kualitas manusia mandiri berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal.

3. Sejahtera

Masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup berkelanjutan dalam aspek ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan hidup, didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi :

Dari uraian visi diatas berdasarkan 3 (tiga) frase selanjutnya dijabarkan dalam Misi Bupati Bone 2013 – 2018 sebagai berikut yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan.
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
6. Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN

Berkaitan dengan misi tersebut, Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, akan menjalankan program dan kegiatan sebagaimana misi 3 yaitu Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan. Implikasi misi pada Dinas Perdagangan adalah Penumbuhan dan Penyebaran bidang Perdagangan yang berbasis masyarakat.

2.1.2 VISI DAN MISI DINAS PERDAGANGAN

Adapun Visi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bone yaitu:

“TERWUJUDNYA EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERDAGANGAN SEBAGAI PENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN BONE”.

Uraian penjelasan terhadap visi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Kabupaten Bone yang terletak dipesisir Timur Sulawesi Selatan dan merupakan Pusat Pengembangan wilayah V, diharapkan dimasa yang akan datang menjadi pusat perdagangan;
2. Pertumbuhan adalah suatu tingkat kemajuan yang dicapai dari tahun ketahun merupakan parameter tingkat keberhasilan dalam pengembangan Perdagangan;
3. Perdagangan adalah suatu bidang kegiatan yang dilakukan dengan alat-alat atau cara-cara yang teratur untuk mencari keuntungan dengan memindahkan sesuatu barang atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha.
4. Terwujudnya adalah suatu hasil kinerja yang dilakukan secara nyata dan kongkrik serta menunjukkan peningkatan dan perbaikan dari tahun ketahun dalam pencapaian target kinerja yang direncanakan.
5. Ekonomi adalah salah satu indicator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat

Dalam rangka mewujudkan Visi dari Dinas Perdagangan Kabupaten Bone, maka perlu perumusan Misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diwujudkan dengan memperhatikan Misi Kabupaten Bone yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018 dan kondisi objektif pengembangan perdagangan yang telah dicapai dan prospek pengembangan perdagangan yang berbasis masyarakat. Adapun Misi Pembangunan

Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran Dinas Perdagangan Kabupaten Bone berdasarkan kewenangan dengan dukungan aparatur dengan partisipasi masyarakat
2. Mendorong Penumbuhan dan persebaran UDKM di Pedesaan yang berbasis sumber daya alam
3. Mengembangkan Kewirausahaan di Pedesaan dalam kegiatan Agrobisnis yang berbasis Sumber Daya
4. Meningkatkan Tertib Usaha dan Perlindungan Konsumen

2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Dinas Perdagangan Kabupaten Bone.

Apabila dilihat dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program Bupati terpilih dikaitkan dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone maka hubungan dan korelasi yang sangat relevan dan erat kaitannya adalah sebagai berikut :

- Misi 3 : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Masyarakat berbasis potensi Lokal dan Kawasan Lingkungan
- Tujuan : Meningkatkan Investasi Pengembangan Industri,Koperasi UMKM, Perdagangan dan Pariwisata untuk mengurangi Pengangguran.
- Sasaran : Meningkatkan Aktivitas Perdagangan dalam dan Luar Negeri

Indikator kinerja dan target kinerja untuk tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatkan Investasi Pengembangan Industri,Koperasi UMKM, Perdagangan dan Pariwisata untuk	Jumlah Pasar Desa yang di Rehabilitasi	Unit	10	16
	Persentase Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal	%	2%	10%

mengurangi Pengagguran	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Data Pengawasan UTP	Kecamatan	(17Kec.)	(27Kec)
------------------------	---	-----------	----------	---------

2.1.4 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Meningkatkan Investasi Pengembangan Industri,Koperasi UMKM, Perdagangan dan Pariwisata untuk mengurangi Pengagguran

Sasaran :

- 1. Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri

Tabel 2.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perdagangan

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri	Jumlah Pasar Desa yang di Rehabilitasi	Unit	10	16
	Persentase Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal	%	2%	10%
	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Data Pengawasan UTP	Kecamatan	(17Kec.)	(27Kec)

2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri	1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	2. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
	3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Dinas Perdagangan Kabupaten Bone telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri	Jumlah Pasar Desa yang di Rehabilitasi	Unit	2
	Persentase Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal	%	10
	Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Data Pengawasan UTTP	Kecamatan	27

Namun pada Tahun 2018 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Bupeti Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupten Bone, tanggal 13 November 2018 2018 sehingga Perjanjian Kinerja Tahun 2018 direvisi sesuai penetapan IKU Tahun 2018.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Pada Tahun 2018 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Bupeti Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupten Bone, tanggal 13 November 2018 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU Dinas Perdagangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah Kotribusi PDRB dari Sektor Perdagangan	x100%	BPS	BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK
			Jumlah total PDRB			
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik	x100%	BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
			Jumlah Seluruh Pasar			
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	Jumlah Potensi Komodity Unggulan yang terpublikasi	x100%	BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN	BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN
			Jumlah Keseluruhan Komodity Unggulan			
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal yang dibina	x100%	BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI	BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI
			Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal			
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	x100%	BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS	BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS
			Jumlah Alat UTTP yang Tera Ulang			
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	Jumlah Laporan Konsumen yang di Tindak Lanjuti	x100%		
			Jumlah Laporan Konsumen			

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp 9.584.257.087,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.6 Rencana Belanja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone
TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.467.552.987,00	15.31
2	Belanja Langsung	8.116.704.100,00	84.69
Jumlah		9.584.257.087,00	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Persentase Anggaran
Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah dari Sektor Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Kegiatan Fasilitas Ke mudahan Perijinan Pengembangan Usaha	31,000,000.00	29,500,000	95.2%
				• Kegiatan Pengembangan an Pasar Lelang Daerah	15,550,000.00	14,600,000	93.9%
				• Kegiatan Fasilitas Pasar Murah	92,670,000.00	92,670,000	100.0%
		Peningkatan Pasar daerah		• Kegiatan Pengembangan an Sarana dan Prasara na Perdagangan	6,302,500,000.00	6,284,835,847	99.7%
				• Kegiatan Operasiona lisasi Sistem Resi Gudang	58,219,500.00	58,173,049	99.9%

				• Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan	26,679,000.00	26,679,000	100.0%
				• Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat (utang)	186,439,100.00	186,439,100	100.0%
		Persentase Potensi Komoditi Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	10,641,000.00	10,638,200	99.97%
				-Pengembangan database informasi potensi unggulan	20,514,000.00	20,514,000	100.0%
				-Promosi Produk Daerah	131,300,000.00	131,300,000	100.0%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	-Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan	11,042,000.00	12,780,000	115.7%

	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemtrologian Daerah	43,750,000.00	43,738,501	100.0%
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti		-Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	12,800,000.00	12,780,000	99.8%
				-Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	30,576,000.00	30,525,000	99.8%
				Total Anggaran Tahun 2018	9,584,257,087.00	9,461,808,880.00	98.7%

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp.6,811,225,600.00 dengan prosentase terbesar anggaran untuk mendukung Indikator Jumlah Pasar Desa yang di Rehabilitasi dengan besaran 70.04%. .Sementara itu, Indikator dengan anggaran yang relatif kecil adalah Indikator Persentase Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal sebesar 0.12 % dari total anggaran belanja langsung



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	> 100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100 %	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Secara umum Dinas Perdagangan Kabupaten Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat 1 sasaran dengan 3 indikator sasaran.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri	4	BS = 2 B = 1 SK = C = K = 1
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	2	BS = 0 B = 2 SK =
			C = K = 0
	JUMLAH	6	BS = 2 B = 3 SK = C = K = 1

3.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perdagangan
Kabupaten Bone Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR IMPACT	TARGET	Realisasi	Capaian
			2018	2018	%
(1)	(3)	(4)	(6)		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,54	11,76	102%

sektor Perdagangan	Persentase Pasar dalam Kondisi baik	35%	44%	125%
	Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	75%	60%	80%
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	10	6.42	64.2%
Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%	100%
	Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	100%	100%

Dari satu sasaran dengan tiga indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.4

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri			
1.	Baik Sekali	2	33,33
2.	Baik	3	50
3.	Cukup		
4.	Kurang	1	16.67
5.	Sangat Kurang		
	Jumlah	6	100

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Sasaran diatas dengan Tiga indikator kinerja, diketahui bahwa 2 indikator sasaran atau 33.33 % Baik Sekali , 3 indikator sasaran atau 50% baik dan 1 indikator sasaran atau 1,67% Kurang

3.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perdagangan tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Dinas Perdagangan dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

- 1. Sasaran 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan
 - a. **Sasaran 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 1**

**Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya
Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan**

NO	SASARAN	INDIKATOR IMPACT	TARGET	Realisasi	Capaian
			2018	2018	%
(1)	(3)	(4)	(6)		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,54	11,76	102%
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	35%	44%	125%
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	75%	60%	80%
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	10	6.42	64,2%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ,dengan capaian **102% telah melebihi target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 11,76%, dari target 11,54% dengan persentase 102% Capaian ini dikategorikan **sangat Baik**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Persentase Pasar dalam Kondisi baik, dengan capaian **125 % telah melebihi target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 44 %, dari target 35 % dengan persentase 125 % Capaian ini dikategorikan **Sangat Baik**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 3 yaitu Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi, dengan capaian **80 % kurang dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 60 %, dari target 75% dengan persentase 80 % Capaian ini dikategorikan **Baik**

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 4 yaitu Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal, dengan capaian **64.2 % kurang dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 6.42 %, dari target 10 % dengan persentase 64.2 % Capaian ini dikategorikan **Kurang**

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Periode Akhir Renstra Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 3.6 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

INDIKATOR IMPACT	BASELINE	TARGET			REALISASI			Capaian		
	2012	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	7,69	10,08	10,79	11,54	11,04	11,53	11,76	110%	107%	102%
Persentase Pasar dalam Kondisi baik	20%	30%	33%	35%	30%	35%	44%	100%	108%	125%
Persentase Potensi Komoditi Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	Belum ada	Belum ada	Belum ada	75%	Belum ada	Belum ada	60%	-	-	80%
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	Belumada	8,4	10	10,00	4,32	5,45	6,42	51,43%	54,50%	64,20%

1. Capaian pada Indikator 1 yaitu Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB tahun 2018 mencapai 102 % dari target 100% mengalami **penurunan** dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 5 %
 2. Capaian pada Indikator 2 yaitu Persentase Pasar dalam Kondisi baik tahun 2018 mencapai 125 % dari target 100% mengalami **peningkatan** dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 17 %
 3. Capaian pada Indikator 3 yaitu Persentase Potensi Komoditi Unggulan Kabupaten yang terpublikasi tahun 2018 mencapai 80 % dari target 100%
 4. Capaian pada Indikator 4 yaitu Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)(tahun 2018 mencapai 64,2 % dari target 100% mengalami **peningkatan** dari tahun 2017 (tahun sebelumnya) sebesar 9,7 %
- Target tahun 2018 ini merupakan Capaian Akhir RPJMD yang telah dicapai/ belum dicapai sesuai yang direncanakan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2018 telah melebihi target yaitu dari 11,54 % menjadi 11,76 % namun apabila dibandingkan dengan capaian Kinerja tahun 2017 sebesar 107% dan Capaian Kinerja Tahun 2018 sebesar 102 % hal ini disebabkan karena adanya perdagangan online yang tidak diketahui jumlah perdagangan secara keseluruhan.

2. Persentase Pasar dalam Kondisi baik

Pembangunan Pasar Daerah Dinas Perdagangan tahun 2018 dilaksanakan dengan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri pada Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ditandai dengan terlaksananya Pembangunan/ Renovasi Pasar . Pembangunan Pasar ini dilaksanakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kegiatan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dana penunjang lainnya serta didukung oleh dana Tugas Pembantuan(TP) Kementerian Perdagangan RI. Pasar yang diharapkan, yaitu pasar yang representatif, bersih dan nyaman.

Jumlah Pasar yang ada di Kabupaten bone adalah sebanyak 80 Unit Pasar yang tersebar di 27 Kecamatan. Pada Tahun 2017 Jumlah pasar dalam kondisi baik sebanyak 28 Unit Pasar . Pada Tahun 2018 Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilaksanakan sebanyak 7 Unit Yaitu

- a. 5 Pasar yaitu Pasar Welado Kecamatan Ajangale, Pasar Taretta Kecamatan Amali, Pasar Cenrana Kecamatan Cenrana, Pasar Koppe Kecamatan Bengo, dan Pasar Pamusureng Kecamatan Bontocani menggunakan dana DAU-DAK sebesar Rp. 5.997.148.000,00
- b. 2 Pasar yaitu Pasar Apala Kecamatan Barebbo dan Pasar Bulu-bulu Kecamatan Tonra menggunakan dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp. 12.000.000.000,00.

Dengan demikian pada Tahun 2018 Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik adalah sebanyak 35 Unit Pasar atau sebesar 44 % dari Jumlah Pasar yang ada di Kabupaten Bone. Hal ini lah yang menyebabkan capaian

Kinerja Dinas Perdagangan dalam hal Jumlah Pasar Daerah mencapai 125% dari target 35% dan Terealisasi sebanyak 44 %.

Gambar Pasar Yang dibangun pada Tahun 2018



Gambar 3.1 Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat

3. Persentase Potensi Komoditi Unggulan Kabupaten yang terpublikasi
- Jumlah Komoditi Unggulan yang ada di Kabupaten Bone adalah sebanyak 10 Jenis Komoditi yang tersebar di 27 Kecamatan namun pada Tahun 2018 hanya 8 Jenis Komoditi sehingga capaiannya 80%

4. Persentase Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal

Dalam hal cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal (%) dapat dilihat dari jumlah perusahaan sebanyak 1.870 Unit perusahaan dengan Jumlah Perusahaan binaan sebanyak 120 Unit dengan Persentase sebesar 6.42 %. Sehingga dapat di ketahui persentase capaian kinerja sebesar 64.2% dengan target sebesar 10%. Adapun permasalahan yang dihadapi sehingga capaian kinerja dibawah 100% adalah sebagai berikut:

- a) Perubahan OPD yang awalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Perdagangan yang mana awalnya program Pembinaan Perusahaan banyak dilaksanakan pada urusan perindustrian.
- b) Kurangnya ASN yang dapat diberdayakan untuk melakukan pembinaan langsung pada perusahaan.



Gambar 3.2 Kegiatan Sosialisasi Pedagangan Kaki Lima

d. Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari satu indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, , sebagaimana ditunjukkan

dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk indikator 2. Persentase Pasar dalam Kondisi baik, telah mencapai kinerja sebanyak 125% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 70.04 % dari total anggaran yang dialokasikan pada Dinas Perdagangan Kabupaten Bone. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	102%	99.70%	0.10%
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	125%		
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	80%	99.99%	
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	64%	100%	
		Jumlah		99.90%	

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel. 3.8 Program dan Kegiatan

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Persentase Anggaran
Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	31.000.000,00	29.500.000	95,2%
		· Kegiatan Pengembangan Pasar Lelang Daerah	15.550.000,00	14.600.000	93,9%
		· Kegiatan Fasilitas Pasar Murah	92.670.000,00	92.670.000	100,0%
Peningkatan Pasar daerah		· Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan	6.302.500.000,00	6.284.835.847	99,7%
		· Kegiatan Operasionalisasi Sistem Resi Gudang	58.219.500,00	58.173.049	99,9%
		· Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan	26.679.000,00	26.679.000	100,0%
		· Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat (utang)	186.439.100,00	186.439.100	100,0%
Persentase Potensi Komoditi Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	-Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	10.641.000,00	10.638.200	100,0%
		-Pengembangan database informasi potensi unggulan	20.514.000,00	20.514.000	100,0%
		-Promosi Produk Daerah	131.300.000,00	131.300.000	100,0%
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	-Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan	11.042.000,00	12.780.000	115,7%

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 6,713,057,600.00 dengan realisasi mencapai Rp 6,692,896,996.00 atau

sebesar 99.7 % Sasaran program adalah Meningkatkan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri dengan hasil yang dicapai Jumlah Pasar yang di Rehabilitasi. Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan;

Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ditandai dengan terlaksananya Pembangunan/ Renovasi Pasar . Pembangunan Pasar ini dilaksanakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kegiatan Konstruksi dan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dana penunjang lainnya. Pasar yang diharapkan, yaitu pasar yang refresentatif, bersih dan nyaman.

Pada Tahun 2018 Pembangunan/ Revitalisasi Pasar Rakyat yang dilaksanakan sebanyak 7 Unit Yaitu a. 5 Pasar yaitu Pasar Welado Kecamatan Ajangale, Pasar Taretta Kecamatan Amali, Pasar Cenrana Kecamatan Cenrana, Pasar Koppe Kecamatan Bengo, dan Pasar Pamusureng Kecamatan Bontocani menggunakan dana DAU-DAK sebesar Rp. 5.997.148.000,00 dan 2 Pasar yaitu Pasar Apala Kecamatan Barebbo dan Pasar Bulu-bulu Kecamatan Tonra menggunakan dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp. 12.000.000.000,00.

b. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha

Tercapainya Peningkatan Penerimaan Retribusi PAD yang didukung dengan Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha dengan Target Penerimaan tertentu. Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendatangi dan memfasilitasi pengusaha yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone untuk mengurus izin Usaha (HO). Pada Tahun 2018 dengan dana DAU sebesar Rp. 31,000,000.00 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 29,500,000.00 atau sebesar 95.16 %

c. Pengembangan Pasar Lelang Daerah;

Pengembangan Pasar Lelang Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan Jaringan Pemasaran dan Harga serta mempromosikan hasil komoditi Unggulan Kabupaten Bone, Maka Kegiatan Pasar Lelang Daerah dilakukan dengan Mengikutsertakan Komoditi Unggulan Daerah Kabupaten Bone dan pelaku usaha/ Calon pengusaha pada Pasar lelang yang dilaksanakan di Maros. Pada Tahun 2018 kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 15,550,000.00 dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp. 14,600,000.00 atau sebesar 93.89%

d. Fasilitasi Pasar Murah.

Dalam rangka Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri pada Kegiatan Fasilitasi Pasar Murah yang ditujukan supaya terciptanya atau terwujudnya standarisasi harga yang stabil dan lebih murah sehingga masyarakat utamanya masyarakat ekonomi lemah dapat mendapatkan Sembako dengan harga murah.

Tahun 2018 Pelaksanaan Fasilitasi Pasar Murah dilaksanakan dengan penyerahan Paket Sembako sebanyak 600 Paket kepada masyarakat dan Pelaksanaan Pasar Murah dengan melibatkan Distributor sebanyak 3 Kali yaitu Sebelum Bulan Ramadhan, Sebelum Idul Fitri dan Sebelum Natal yang dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riattang, dengan dana DAU sebesar Rp.92.670.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 92.670.000,- atau sebesar 100 %;

e. Operasionalisasi Sistem Resi Gudang;

Kegiatan Operasionalisasi Sistem Resi Gudang dilakukan dengan cara mengoperasikan dan memelihara Gudang yang terletak di Kecamatan Dua Bocoe . Tahun 2018 Pelaksanaan Kegiatan Operasionalisasi Sistem Resi Gudang Menggunakan dana DAU sebesar Rp. 58.219.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 58.173.049,- atau sebesar 99.92 %

f. Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan;

Bimbingan Teknis Pengelola pasar dan Pergudangan dilaksanakan dengan tujuan peningkatan Pengetahuan Pengelola Pasar dan Pergudangan. Bimbingan Teknis ini ditujukan pada Aparat dan Pengelola Pasar dan Pergudangan. Bimbingan Teknis ini dengan dana DAU sebesar Rp. 26.679.000,- dengan Realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 26.679.000,- atau sebesar 100 %.

g. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat (utang)

Kegiatan ini merupakan pembayaran utang Retensi (Pemeliharaan 5%) Pembangunan Pasar pada Tahun 2017 yang dibayarkan pada Tahun 2018 dengan dana DAU sebesar Rp. 186.439.100,- dengan Realisasi Tahun 2018 sebesar Rp. 186.439.100,- atau sebesar 100 %.

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 162.455.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 162.452.200,-. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor dilaksanakan dengan Dana DAU sebesar Rp. 10.641.000,- dengan

realisasi keuangan sebesar Rp. 10.638.200,- atau sebesar 99,97%. Kegiatan ini dilakukan melalui pelaksanaan sosialisasi terkait Dokumen Pelaksanaan Ekspor dan Impor dengan Pemateri dari Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan

- b. Pengembangan database informasi potensi unggulan dilaksanakan dengan Dana DAU sebesar Rp. 20.514.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.514.000,- atau sebesar 100%. Kegiatan ini dilakukan melalui pengumpulan Data Potensi Unggulan yang ada di Kabupaten Bone
 - c. Promosi Produk Daerah Kegiatan Promosi Produk Daerah dilaksanakan dengan cara ikut serta pada kegiatan Pameran Produk Unggulan Kabupaten Bone. Pada Tahun 2018 Pameran yang diikuti adalah Pameran di Balikpapan, Jakarta, Makassar dan di Watampone. Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 131.300.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 131.300.000,- atau sebesar 100%.
3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.11.042.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.11.042.000,- Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- a. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 11.042.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 11.042.000,- atau sebesar 100%.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a) Banyaknya pedagang kaki lima/ Asongan yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Sehingga mengganggu Kenyamanan masyarakat lainnya.
- b) Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dalam pengelolaan sampah
- c) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus Izin Perdagangan (HO) dikarenakan Jarak antara lokasi tempat usaha dengan lokasi pengurusan izin HO yang jauh
- d) Kurangnya minat pelaku usaha untuk mengikuti Pasar Lelang dikarenakan pengusaha lebih memilih menjual langsung Komoditi yang dimiliki kepada Pengusaha di Makassar.

- e) Pelaku usaha tidak memanfaatkan Gudang yang disediakan dikarenakan Pelaku usaha tidak memahami bagaimana system Resi Gudang yang maksud.
- f) Belum terbentuknya struktur pengelolah resi gudang yang permanen dikarenakan kurangnya tenaga aparat yang berkompeten.
- g) Masih adanya pedagang nakal yang melakukan pelanggaran yang dapat merugikan konsumen

2. Solusi

Solusi yang diambil dalam menyelesaikan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penyuluhan langsung kepada pedangan kaki lima/Asongan tentang peningkatan disiplin pedangan dalam berjualan.
- b) Melakukan fasilitasi bagi pelaku usaha yang lokasinya jauh dengan cara menjemput dan melakukan sosialisasi secara langsung pada pengusaha.
- c) Mengikut sertakan pelaku usaha dalam kegiatan Pasar lelang yang dilaksanakan di Makassar sehingga membuka pengetahuan Pelaku Usaha bagaimana sistem pelaksanaan Pasar Lelang yang Maksud.
- d) Melakukan Kegiatan Sosialisasi Sistem Resi Gudang pada Pelaku Usaha yang bekerja sama dengan BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)
- e) Mengikut sertakan Aparat dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar dan Pergudangan.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Perlindungan Konsumen

- a. Sasaran 1: Meningkatnya Perlindungan Konsumen Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 2

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Perlindungan Konsumen

N O	SASARAN	INDIKATOR IMPACT	TARGET	Realisasi	Capaian
			2018	2018	%
(1)	(3)	(4)	(6)		
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%	100%
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target

pada indikator kinerja utama 1 yaitu Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang ,dengan capaian **100% telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai, 100%, dari target 100% dengan persentase 100% Capaian ini dikategorikan **Baik**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti, dengan capaian **100 % telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100%, dari target 100 % dengan persentase 100 % Capaian ini dikategorikan **Baik**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Akhir Periode RPJMD Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 2

Tabel 3.6 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

INDIKATOR IMPACT	BASELINE	TARGET			REALISASI			Capaian		
	2012	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)	(9)	(10)	(11)
Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1. Capaian pada Indikator 1 yaitu Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang tahun 2018 mencapai 100 % dari target 100% tidak mengalami **Peningkatan ataupun penurunan** dari tahun 2017 (tahun sebelumnya)
2. Capaian pada Indikator 2 yaitu Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti tahun 2018 mencapai 100 % dari target 100% tidak mengalami **Peningkatan ataupun penurunan** dari tahun 2017 (tahun sebelumnya)

Target tahun 2018 ini merupakan Capaian Akhir RPJMD yang telah dicapai/ belum dicapai sesuai yang direncanakan.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang
Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang Tahun 2018 telah mencapai target yaitu dari 100 % hal ini didukung oleh adanya MOU antara Pemerintah Kabupaten Bone dengan Pemerintah Kota Pare-Pare

dalam hal pelaksanaan Tera Ulang (Metrologi Legal) sehingga Usulan Tera Ulang untuk alat UTTP dapat dilakukan dengan baik.

2. Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti

Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti terealisasi dengan adanya Laporan dari Masyarakat, Lembaga atau Badan tertentu mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang, pengusaha ataupun perusahaan.

Pada tahun 2018 Jumlah Laporan Masyarakat yang masuk adalah sebanyak 4 Laporan yaitu :

- a. Laporan mengenai Peningkatan Harga beras yang dilakukan oleh pedagang sepihak penyelesaiannya dilakukan operasi pasar langsung pada pedagang beras dan memberikan penyuluhan langsung.
- b. Laporan Mengenai adanya Barang Kadaluarsa yang beredar di Pasar Tradisional maupun Modern. Penyelesaiannya adalah dengan melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penyitaan barang kadaluarsa tersebut.
- c. Laporan mengenai adanya salah satu perusahaan pembiayaan yang menahan BPKB Kendaraan Konsumen yang telah lunas. Penyelesaiannya yaitu dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan tersebut dan menyelesaikan secara kekeluargaan.
- d. Laporan mengenai kelangkaan Tabung Gas LPG 3 Kg yang diakibatkan adanya penimbunan oleh pengusaha rumah makan. Penyelesaiannya adalah dengan melakukan operasi langsung dan menyita Tabung LPG 3 Kg milik pengusaha rumah makan dan memberikan sosialisasi mengenai kalangan yang seharusnya menggunakan Tabung Gas LPG 3 Kg

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari satu indikator, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah

satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	100%	99.9%	0.100%
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100%		
		Jumlah		99.90%	

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel. 3.8 Program dan Kegiatan

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Anggaran	Realisasi	Persentase Anggaran
Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	-Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kentrologian Daerah	43.750.000,00	43.738.501	100,0%
Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti		-Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	12.800.000,00	12.780.000	99,8%
		-Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	30.576.000,00	30.525.000	99,8%

Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

1. Program Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pada Tahun 2018 Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.87.126.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.87.043.501,-.Sasaran program adalah Meningkatkan aktivitas perdagangan dalam dan luar negeri dengan hasil yang dicapai Jumlah Kecamatan yang Mendapatkan Data Pengawasan UTTP.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa;

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 12.800.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 12.780.000,- atau sebesar 99.84 %.

b. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah;

Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah merupakan kegiatan Pengendalian dan Terwujudnya Tertib Ukur pada Alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP), utamanya terhadap Pemilik/ Pengguna dan Penjual BDKT, pelaksanaan pengawasan dalam upaya Peningkatan Pengawasan Kemetrolagian yang bekerja sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan pada Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah tetap tersebar di 27 Kecamatan. Pada Tahun 2018 Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 43.750.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 43.738.501,- atau sebesar 99.97 %.

c. Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok;

Tersedianya Data Harga Sembilan Bahan Pokok sebagai wujud dari Standarisasi Harga pada kegiatan Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok dalam rangka peningkatan perlindungan terhadap konsumen dengan harga yang stabil dan terjangkau sebagai upaya pengamanan perdagangan dan pada kegiatan ini untuk mempermudah konsumen dan masyarakat pada umumnya maka Data Harga Sembilan Bahan Pokok dapat diakses pada Koran Radar terbitan setiap 1 kali sebulan. Pada Tahun 2018 Kegiatan ini dilaksanakan dengan dana DAU sebesar Rp. 30.576.000,- dan realisasi Keuangan sebesar Rp. 30.525.000,- atau sebesar 99.83 %.

f. .Permasalahan dan Alternatif Solusi

1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yaitu sebagai berikut:

- a) Belum adanya SDM yang siap untuk dijadikan tenaga Penera di Kabupaten Bone sehingga masih bergantung pada MOU dengan Pemerintah Kota Pare-Pare
- b) Kurangnya kesadaran pedagang akan pentingnya menjaga kepercayaan konsumen demi kelancaran usahanya

- c) Kurangnya kesadaran Pedagang untuk mengusulkan pelaksanaan Tera Ulang pada Alat UTTP yang dimilikinya.
- d) Masih adanya pedagang nakal yang melakukan pelanggaran yang dapat merugikan konsumen
- e) Masih Kurangnya Laporan pelanggaran yang merugikan konsumen.

2. Solusi

Solusi yang diambil dalam menyelesaikan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a) Mengusulkan ke BKPSDM Kab. Bone untuk menyiapkan Aparat yang kompetent untuk bisa ikut pada pelatihan Kemetrolagian Legal
- b) Melakukan Operasi Pasar terkait Laporan yang Masuk
- c) Melakukan Pengawasan dan Monitoring Barang kebutuhan Pokok seminggu sekali.
- d) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak yang harus diterima Konsumen

3.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Perdagangan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.9.461.808.880,- atau 98.72%.

1. Anggaran Kinerja :	
- Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.375.855.181,- (93.75%)
- Belanja Langsung	Rp. 8.085.953.699,- (99.62%)
2. Sumber Dana APBN/TP	Rp. 11.933.258.200,- (99.44%)
<hr/>	
Jumlah	Rp. 21.395.067.080,-,- (97.60%)

2. Pemanfaatan Anggaran

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Perdagangan terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Perdagangan Kabupaten Bone dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.375.855.181,- (93.75%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.244.906.091
Tambahan Penghasilan PNS	Rp 130.949.090
Insentif Pungutan Retribusi daerah	Rp 0,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Perdagangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 8.085.953.699,- (99.62%) dengan jumlah 9 program dan 33 kegiatan.

b. Sumber Dana APBN

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Bone yang bersumber dari dana APBN melalui kegiatan Tugas Pembantuan (TP) sebanyak 1 Program : Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri pada Kegiatan : Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan dengan realisasi anggaran sebesar 11.933.258.200,- (99.44%) dan realisasi fisik sebesar 100 %.

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Perdagangan Kabupaten Bone tahun 2018 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Banyaknya pedagang kaki lima/ Asongan yang berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Sehingga mengganggu Kenyamanan masyarakat lainnya.
- b) Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima dalam pengelolaan sampah
- c) Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mengurus Izin Perdagangan (HO) dikarenakan Jarak antara lokasi tempat usaha dengan lokasi pengurusan izin HO yang jauh
- d) Kurangnya minat pelaku usaha untuk mengikuti Pasar Lelang dikarenakan pengusaha lebih memilih menjual langsung Komoditi yang dimiliki kepada Pengusaha di Makassar.
- e) Pelaku usaha tidak memanfaatkan Gudang yang disediakan dikarenakan Pelaku usaha tidak memahami bagaimana system Resi Gudang yang maksud.
- f) Belum terbentuknya struktur pengelola resi gudang yang permanen dikarenakan kurangnya tenaga aparat yang berkompeten.
- g) Masih adanya pedagang nakal yang melakukan pelanggaran yang dapat merugikan konsumen
- h) Kurangnya pengetahuan konsumen atas hak yang harus diterima sebagai konsumen

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

- a) Melakukan penyuluhan langsung kepada pedagang kaki lima/Asongan tentang peningkatan disiplin pedagang dalam berjualan.
- b) Melakukan fasilitasi bagi pelaku usaha yang lokasinya jauh dengan cara menjemput dan melakukan sosialisasi secara langsung pada pengusaha.
- c) Mengikut sertakan pelaku usaha dalam kegiatan Pasar lelang yang dilaksanakan di Makassar sehingga membuka pengetahuan Pelaku Usaha bagaimana sistem pelaksanaan Pasar Lelang yang Maksud.
- d) Melakukan Kegiatan Sosialisasi Sistem Resi Gudang pada Pelaku Usaha yang bekerja sama dengan BAPPEPTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)
- e) Mengikut sertakan Aparat dalam Bimbingan Teknis Pengelolaan Pasar dan Pergudangan.
- f) Melakukan Pengawasan dan Monitoring Barang kebutuhan Pokok seminggu sekali.
- g) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak yang harus diterima Konsumen



BAB IV PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Perdagangan Kabupaten Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Bone pada tahun 2018 adalah baik, karena terdapat 1 indikator memenuhi kriteria sangat baik dan 2 indikator memenuhi kriteria cukup.


Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Bagi instansi Dinas Perdagangan sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Perdagangan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

Watampone, 04 Februari 2019

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KABUPATEN BONE,**
H. SUMAR D.I.S.Sos.M.Si
NIP.19680821 199103 1 010

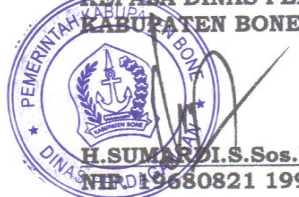
Lampiran

REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN 2018


SKPD/UNIT KERJA: DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp 22,825,100	Rp 21,986,441	96.33%	-	-	
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 120,374,400	Rp 115,473,593	95.93%	-	-	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp 5,498,000	Rp 5,498,000	100.00%	-	-	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 2,605,000	Rp 2,604,000	99.96%	-	-	
		Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 37,500,000	Rp 37,490,000	99.97%	-	-	
		Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Rp 350,000,000	Rp 349,969,918	99.99%	-	-	
		Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp 127,569,000	Rp 127,557,950	99.99%	-	-	
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Pengadaan Kendaran Dinas/Operasional	Rp 123,568,000	Rp 123,097,000	99.62%	-	-	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp 31,750,000	Rp 31,750,000	100.00%	-	-	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp 22,300,000	Rp 22,300,000	100.00%	-	-	
		Pengadaan Mebeleur	Rp 6,970,000	Rp 6,970,000	100.00%	-	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp 33,622,000	Rp 33,265,500	98.94%	-	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 74,200,000	Rp 72,204,600	97.31%	-	-	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor	Rp 10,850,000	Rp 10,850,000	100.00%			
3	PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Bimbingan Teknis Implemtasi Peraturan Perundang- undangan	Rp 25,200,000	Rp 25,200,000	100.00%	-	-	
4	PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 24,400,000	Rp 22,900,000	93.85%			
5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Penyusunan Dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	100.00%	-	-	
		Monitoring, Evaluasi dan Peloparan	Rp 53,792,000	Rp 53,402,000	99.27%			
		Pengadaan Aplikasi/Website	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000	100.00%			
49								

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
6	PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	Rp 12,800,000	Rp 12,780,000	99.84%	Belum adanya tenaga Ahli di Bidang Tera Ulang	Telah diminta Staf yang bisa Mengikuti DIKLAT yang dimaksud	
		Operasionalisasi dan Pengemb. UPT Kemetrolgian Daerah	Rp 43,750,000	Rp 43,738,501	99.97%			
		Monitoring Bahan Kebutuhan Pokok	Rp 30,576,000	Rp 30,525,000	99.83%	-	-	
7	PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	Sosialisasi Kebijakan Penyederhanaan Prosedur dan Dokumen Ekspor dan Impor	Rp 10,641,000	Rp 10,638,200	99.97%	-	-	
		Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	Rp 20,514,000	Rp 20,514,000	100.00%	-	-	
		Promosi Produk Daerah	Rp 131,300,000	Rp 131,300,000	100.00%	-	-	
8	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	Rp 31,000,000	Rp 29,500,000	95.16%	Masih Kurangnya kesadaran Pengusaha untuk mengurus izin usaha	Melakukan Penyuluhan langsung ke masyarakat	
		Pengembangan pasar Lelang Daerah	Rp 15,550,000	Rp 14,600,000	93.89%	-	-	
		Pasar Murah	Rp 92,670,000	Rp 92,670,000	100.00%	-	-	
		Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan	Rp 6,302,500,000	Rp 6,284,835,847	99.72%	-	-	
		Operasionalisasi Sistem Resi Gudang	Rp 58,219,500	Rp 58,173,049	99.92%	Belum adanya tenaga ahli yang dapat mengoperasikan Gudang yang ada	Melakukan koordinasi dengan BAPEBTI	
		Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan	Rp 26,679,000	Rp 26,679,000	100.00%	-	-	
		Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perdagangan (utang)	Rp 186,439,100	Rp 186,439,100	100.00%			
9	PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Kegiatan Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima Dan Asongan	Rp 11,042,000	Rp 11,042,000	100.00%			
			Rp 8,116,704,100	Rp 8,085,953,699	99.62%			

KEPALA DINAS PEDAGANGAN
KABUPATEN BONE,

H. SUMARDI S. Sos. M. Si
NIP. 019680821 199103 1 010

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	<i>Jumlah Kotribusi PDRB dari Sektor Perdagangan</i>	x100%	BPS	BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK
			<i>Jumlah total PDRB</i>			
		Persentase Pasar dalam Kondisi baik	<i>Jumlah Pasar dalam Kondisi Baik</i>	x100%	BIDANG PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI DAN LOGISTIK	
			<i>Jumlah Seluruh Pasar</i>			
		Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	<i>Jumlah Potensi Komodity Unggulan yang terpublikasi</i>	x100%	BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN	BIDANG BINA USAHA PERDAGANGAN
			<i>Jumlah Keseluruhan Komodity Unggulan</i>			
		Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	<i>Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal yang dibina</i>	x100%	BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI	BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH DAN PRODUK DALAM NEGERI
			<i>Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha informal</i>			
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang	<i>Jumlah Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang</i>	x100%	BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS	BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS
			<i>Jumlah Alat UTTP yang Tera Ulang</i>			
		Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	<i>Jumlah Laporan Konsumen yang di Tindak Lanjuti</i>	x100%		
			<i>Jumlah Laporan Konsumen</i>			

KEPALA DINAS PEDAGANGAN
KABUPATEN BONE,

H. SUMARDI S. Sos. M. Si
NIP. 19680821 199103 1 010



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2018
ESELON II, III DAN ESELON IV
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SUMARDI. S.Sos.M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si.
Jabatan : Bupati Bone

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua
Bupati Bone

Dr. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M.Si.

Watampone, Desember 2018
Pihak Pertama



H.SUMARDI.S.Sos.M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19680821 199103 1010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PEDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2 Persentase Pasar dalam Kondisi baik 3 Persentase Potensi Komoditi Unggulan Kabupaten yang terpublikasi 4 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	11.54 40% 75% 5.56
2	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	1 Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang 2 Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100% 100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 537,843,500.00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 256,380,000.00
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 95,000,000.00
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 36,200,000.00
5. Pengembangan Data/Informasi	Rp 99,900,000.00
6. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 88,476,000.00
7. Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Rp 158,605,000.00
8. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 6,256,818,500.00
9. Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp 30,300,000.00
Jumlah	Rp 7,559,523,000.00


BUPATI BONE
[Signature]
Dr. H.A. FAHSAR M. FADJALANG M.Si

Watampone, Desember 2018
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

H. SUMARDI S. Sos. M.Si
Pangkat Pembina Tk. I-IV/b
NIP 19680821199103 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUMARDI, S.Sos.M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perdagangan

H.SUMARDI, S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19680821 199103 1 010

Watampone, 01 Desember 2018

Pihak Pertama
Sekretaris

A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP

Pangkat : Pembina
NIP : 19810716 200112 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

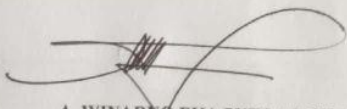
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	1 Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 537,843,500.00
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 256,380,000.00
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 95,000,000.00
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 36,200,000.00
5. Pengembangan Data/Informasi	Rp 99,900,000.00
Jumlah	Rp 1,025,323,500.00

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone


H. SUMARDY S. S. M. Si
Pangkat : Pembina Tk. I (W/b)
NIP : 19680821 199103 1 010

Watampone, 01 Desember 2018
Sekretaris Dinas Perdagangan


A. WINARNO EKA PUTRA S. STP. M. H.
Pangkat : Pembina ,IV/a
NIP : 19810716 200112 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUKSIM, S.Sos., MM
Jabatan : Kabid Bina Usaha Perdagangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUMARDI, S.Sos.M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

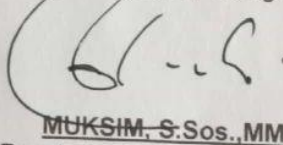
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perdagangan


H. SUMARDI, S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19680821 199103 1 010

Watampone, 01 Desember 2018
Pihak Pertama
Kabid Bina Usaha Perdagangan


MUKSIM, S.Sos., MM

Pangkat : Pembina
NIP : 19721102 199303 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KABID BINA USAHA PERDAGANGAN
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

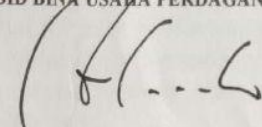
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	1 Persentase Potensi Komodity Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	75%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1. Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Rp 158,605,000.00
Jumlah	Rp 158,605,000.00

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone


H.SUMARDI S.Sos.M.Si
Pangkat : Pembina Tk.1, IV/b
NIP : 19680821 199103 1 010

Watampone, 01 Desember 2018
KABID BINA USAHA PERDAGANGAN


MUKSIL S.Sos.MM
Pangkat : Pembina ,IV/a
NIP : 19721102 199303 1 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra.Hj. MULYATI KADIR
Jabatan : Kabid Bahan Pokok dan Strategis

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUMARDI. S.Sos.M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


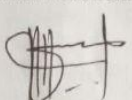
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 01 Desember 2018
Pihak Pertama
Kabid Bahan Pokok dan Strategis

Dra.Hj.MULYATI KADIR
Pangkat : Pembina
NIP : 19640725 199110 2 002

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perdagangan

H.SUMARDI. S.Sos.M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19680821 199103 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE			
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	1 Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang 2 Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100% 100%
PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN	
1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Rp 88,476,000.00	
Jumlah		Rp 88,476,000.00	
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone		Watampone, 01 Desember 2018 BIDANG BAHAN POKOK DAN STRATEGIS	
 H. SUMARDIS S. S. M. Si Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b NIP : 196808211991031010		 Dra. Hj. MULYATI KADIR Pangkat : Pembina ,IV/a NIP : 19640725 199110 2 002	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FIRMAN NUR, SE.M.Si
Jabatan : Kasi Pengelolaan Sarana Distribusi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUMARDI, S.Sos.M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 01 Desember 2018

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perdagangan

Pihak Pertama
Kasi Pengelolaan Sarana Distribusi



H. SUMARDI, S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19680821 199103 1 010


FIRMAN NUR, SE.M.Si

Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19730917 200502 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE			
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2 Persentase Pasar dalam Kondisi baik	11.54 40%


PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat		Rp 6,007,550,000.00
Jumlah		Rp 6,007,550,000.00

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone



H. SUMARDI, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP : 19680821 199103 1 010

Watampone, Desember 2018
KASI PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI



FIRMAN NUR, SE, M.Si
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
NIP : 19730917 200502 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULKARNAIN, S.IP
Jabatan : Kasi Kerja sama Pengembangan Logistik

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUMARDI. S.Sos.M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perdagangan

H.SUMARDI, S.Sps.M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19680821 199103 1 010

Watampone, 01 Desember 2018
Pihak Pertama
Kasi Kerja Sama Pengembangan Logistik


ZULKARNAIN, S.IP

Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19770111 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 KASI KERJASAMA PENGEMBANGAN LOGISTIK DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE			
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2 Persentase Pasar dalam Kondisi baik	11.54 40%


PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perdagangan Rakyat		Rp 6,007,550,000.00
Jumlah		Rp 6,007,550,000.00

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone



H. SUMARDI, S.Pd, M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP : 19680821 199103 1 010

Watampone, 01 Desember 2018
KASI KERJASAMA PENGEMBANGAN LOGISTIK



ZULKARNAIN, S.IP
Pangkat : Penata Tk. I, III/d
NIP : 19770111 199703 1003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IRMA DARMAYANTI, S.Ag.,M.Si
Jabatan : Kasi Pengembangan Sarana Distribusi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SUMARDI. S.Sos.M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kepala Dinas Perdagangan



H.SUMARDI, S.Sos.M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19680821 199103 1 010

Watampone, 01 Desember 2018
Pihak Pertama
Kasi Pengembangan Sarana Distribusi

IRMA DARMAYANTI, S.Ag.,M.Si

Pangkat : Pembina
NIP : 19700415 199303 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	1 Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB 2 Persentase Pasar dalam Kondisi baik	11.54 40%

- PROGRAM/KEGIATAN
1. Sistem Resi Gudang
 2. Bimbingan Teknis Pengelola Pasar dan Pergudangan
- Jumlah

ANGGARAN

Rp 66,598,500.00

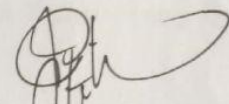
Rp 30,300,000.00

Rp 96,898,500.00

Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bone


H. SUWARDI S. Sos. M. Si
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP : 19680821 199103 1 010

Watampone, 01 Desember 2018
KASI PENGEMBANGAN SARANA DISTRIBUSI

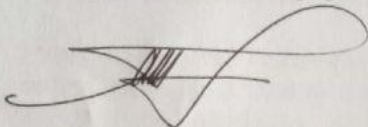

IRMA DARMAYANTI S. Ag. M. Si
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP : 19700415 299303 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASUBAG PROGRAM
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	CC

Kegiatan	ANGGARAN
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 36,200,000.00
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp 29,900,000.00
Jumlah	Rp 66,100,000.00

Sekretaris Dinas Perdagangan



A. WINARNO EKA PUTRA.S.STP.M.H
Pangkat : Pembina ,IV/a
NIP : 19810716 200112 1 004

Watampone, 01 Desember 2018
Kasubag Program



MULYANI,ST
Pangkat : Penata , III/c
NIP : 19870714 201001 2 023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mulyani, ST
Jabatan : Kasubag Program

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Winarno Eka Putra, S.STP
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris

A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP
Pangkat : Pembina
NIP : 19810716 200112 1 004

Watampone, 01 Desember 2018
Pihak Pertama
Kasubag Program

MULYANI, ST
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP : 19870714 201001 2 023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAMSIAR
Jabatan : Kasubag Keuangan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP
Jabatan : Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Bone

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Sekretaris

Watampone, 01 Desember 2018
Pihak Pertama
Kasubag Keuangan

A. WINARNO EKA PUTRA, S.STP

Pangkat : Pembina
NIP : 19810716 200112 1 004

SAMSIAR

Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19610930 198302 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASUBAG KEUANGAN
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Perdagangan	CC

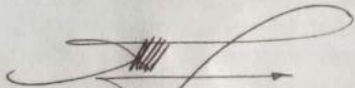
Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

ANGGARAN
Rp 141,126,400.00

Jumlah

Rp 141,126,400.00

Sekretaris Dinas Perdagangan



A. WINARNO EKA PUTRA.S.STP.M.H
Pangkat : Pembina ,IV/a
NIP : 19810716 200112 1 004

Watampone, 01 Desember 2018
Kasubag Keuangan



SAMSIAR
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP : 19610930 198302 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. ERNAWATI.S.Sos
Jabatan : Kasi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. MARWIAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kabid Dagang Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 01 Desember 2018

Pihak Kedua
Kabid Dagang Kecil Menengah dan Produk
dalam Negeri

Pihak Pertama
Kasi Fasilitasi Usaha dan Pemasaran

A. MARWIAH, S.Sos, M.Si

Hj.ERNAWATI.S.Sos

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19660220 198603 2 014

Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19641231 198602 2 54

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI FASILITASI USAHA DAN PEMASARAN
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	5.56

PROGRAM/KEGIATAN

1. Promosi Produk Daerah

ANGGARAN

Rp 131,300,000.00

Jumlah

Rp 131,300,000.00

BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH
DAN PRODUK DALAM NEGERI

A. MARWIAH.S.Sos.,M.Si
Pangkat : Pembina ,IV/a
NIP :19660220 198603 2 014

Watamponc, Desember 2018
KASI FASILITASI USAHA DAN PEMASARAN

Hi. ERNAWATI.S.Sos
Pangkat : Penata Tk.I, III/d
NIP :19641231 198602 2054



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHAIRIL AZIS, ST
Jabatan : Kasi Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. MARWIAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kabid Dagang Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, Desember 2018

Pihak Kedua
Kabid Dagang Kecil Menengah dan Produk
dalam Negeri

Pihak Pertama
Kasi Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis

A. MARWIAH, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19660220 198603 2 014

CHAIRIL AZIS, ST

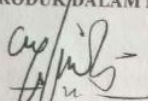
Pangkat : Penata Muda Tk.I
NIP : 19761227 200902 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI IKLIM USAHA DAN BIMBINGAN TEKNIS
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	5.56

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp 11,042,000.00
Jumlah	Rp 11,042,000.00

BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH
DAN PRODUK DALAM NEGERI


A. MARWIAH S. Sos., M. Si
Pangkat : Pembina ,IV/a
NIP :19660220 198603 2 014

Watampone, 01 Desember 2018
KASI IKLIM USAHA DAN
BIMBINGAN TEKNIS


CHAIRIL AZIS, ST
Pangkat : Penata , III/c
NIP :19760227 200902 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. RAHBI, SE
Jabatan : Kasi Pengembangan Produk Lokal dan Penciptaan Produk Dalam Negeri

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. MARWIAH, S.Sos, M.Si
Jabatan : Kabid Dagang Kecil Menengah dan Produk dalam Negeri

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kabid Dagang Kecil Menengah dan Produk
dalam Negeri

A. MARWIAH, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19660220 198603 2 014

Watampone, 01 Desember 2018

Pihak Pertama
Kasi Pengembangan Produk Lokal dan
Penciptaan Produk Dalam Negeri

A. RAHBI, SE

Pangkat : Penata
NIP : 19710330 201001 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL DAN PENCIPTAAN
PRODUK DALAM NEGERI
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal %)	5.56

PROGRAM/KEGIATAN

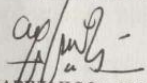
1. Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- 2.

ANGGARAN
Rp 11,042,000.00

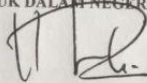
Jumlah

Rp 11,042,000.00

BIDANG DAGANG KECIL, MENENGAH
DAN PRODUK DALAM NEGERI


A. MARWAH S. Sos. M. Si
Pangkat : Pembina ,IV/a
NIP :19660220 198603 2 014

Watampone, 01 Desember 2018
KASI PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL DAN PENCIPTAAN
PRODUK DALAM NEGERI


A. RAHBI SE
Pangkat : Penata , III/c
NIP :19710330 201001 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURZIBAH, S.Pd.,M.Si
Jabatan : Kasi Barang Strategis
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra.Hj. MULYATI KADIR
Jabatan : Kabid Bahan Pokok dan Strategis

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, 01 Desember 2018

Pihak Kedua
Kabid Bahan Pokok dan Strategis

Pihak Pertama
Kasi Barang Strategis

Dra.Hj. MULYATI KADIR

Pangkat : Pembina
NIP : 19640725 199110 2 002

NURZIBAH, S.Pd.,M.Si

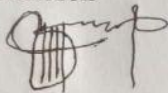
Pangkat : Pembina
NIP : 19690429 199103 2 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI BARANG STRATEGIS
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	1 Persentase Alat UTTP yang Lolos Uji Tera Ulang 2 Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100% 100%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Rp 13,400,000.00
2. Operasionalisasi dan Pengembangan Upt Kemetrolagian Daerah	Rp 50,750,000.00
Jumlah	Rp 64,150,000.00

KABID BAHAN POKOK DAN
STRATEGIS



Dra. Hj. MULYATI KADIR
Pangkat : Pembina IV/a
NIP :19640725 199110 2 002

Watampone, 01 Desember 2018
KASI BARANG STRATEGIS



NURZIBAH S. Pd. M.Si
Pangkat : Pembina IV/a
NIP :19690429 199103 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUL RAMLAN, SE
Jabatan : Kasi Informasi Pasar
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra.Hj. MULYATI KADIR
Jabatan : Kabid Bahan Pokok dan Strategis

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kabid Bahan Pokok dan Strategis

Dra.Hj.MULYATI KADIR
Pangkat : Pembina
NIP : 19640725 199110 2 002

Watampone, 01 Desember 2018

Pihak Pertama
Kasi Informasi Pasar

SYAMSUL RAMLAN, SE
Pangkat : Penata
NIP : 19770830 200904 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI INFORMASI PASAR
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	1 Persentase Alat UTP yang Lolos Uji Tera Ulang 2 Persentase Laporan Konsumen yang diTindak Lanjuti	100% 100%

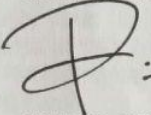
PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Rp 13,400,000.00
2. Pengembangan Pasar Lelang Daerah	Rp 15,550,000.00
Jumlah	Rp 28,950,000.00

KABID BAHAN POKOK DAN STRATEGIS



Dra. Hj. MULYATI KADIR
Pangkat : Pembina ,IV/a
NIP :19640725 1991110 2 002

Watampone, 01 Desember 2018
KASI INFORMASI PASAR



SYAMSUL RAMLAN
Pangkat : Penata, III/c
NIP :19770830 200904 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAHTIAR MUHAMMADIAH
Jabatan : Kasi Informasi Perusahaan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MUKSIM, S.Sos.,MM
Jabatan : Kabid Bina Usaha Perdagangan

selaku atasan pihak pertama selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Kabid Bina Usaha Perdagangan

MUKSIM, S.Sos.,MM

Pangkat : Pembina
NIP : 19721102 199303 1 007

Watampone, 01 Desember 2018
Pihak Pertama
Kasi Informasi Perusahaan

BAHTIAR MUHAMMADIAH

Pangkat : Penata Tk.I
NIP : 19610819 198503 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
KASI INFORMASI PERUSAHAAN
DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN BONE

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi dari sektor Perdagangan	1 Persentase Potensi Komoditi Unggulan Kabupaten yang terpublikasi	75%

PROGRAM/KEGIATAN

1. Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha

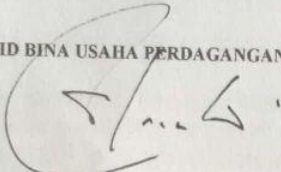
ANGGARAN

Rp 20,000,000.00

Jumlah

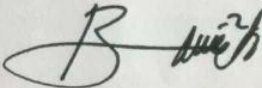
Rp 20,000,000.00

KABID BINA USAHA PERDAGANGAN



MUKSIM.S.Sos.MM
Pangkat : Pembina ,IV/a
NIP : 19721102 199303 1 007

Watampone, 01 Desember 2018
KASI INFORMASI PERUSAHAAN



BAHTIAR MUHAMMADIAH
Pangkat : Penata TK.I, III/d
NIP : 19610819 198503 1 006